

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.1.1 Analisis Aktor dalam Proses Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang**

Tingginya angka HIV/AIDS di Kota Semarang dari tahun ke tahun menjadi keprihatinan tersendiri bagi pemerintah Kota Semarang. Pasalnya berdasarkan data dari Strategi dan Rencana Aksi Daerah Jawa Tengah menunjukkan bahwa angka HIV/AIDS di Kota Semarang merupakan yang tertinggi di Jawa Tengah. Melihat hal ini pemerintah Kota Semarang kemudian terdorong untuk merumuskan kebijakan atau peraturan daerah yang dapat menjadi pedoman dan payung hukum bagi lembaga pemerintah dan non pemerintah di Kota Semarang untuk dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV/AIDS. Dengan adanya peraturan daerah tersebut diharapkan pencegahan penularan HIV/AIDS di Kota Semarang menjadi lebih terkendali. Adapun dalam peraturan daerah tersebut disebutkan terkait siapa saja aktor yang bertanggung jawab dan berperan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang. Beberapa aktor yang tercantum dalam Perda tersebut antara lain Pemerintah Daerah, Tenaga Kesehatan, Pekerja Sosial, Komisi Penanggulangan AIDS, Lembaga Swadaya Masyarakat, ODHA, dan masyarakat. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa setiap aktor ini yang berperan ini memiliki kewajibannya masing-masing dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang. Untuk mengetahui sejauh mana aktor-aktor tersebut terlibat dan menjalankan kewajibannya, berikut merupakan kesimpulan hasil penelitian di lapangan oleh peneliti.

#### **5.1.1.1 Karakteristik Lembaga dan Penguasa**

Keterlibatan aktor dalam implementasi peraturan daerah ini tentu merupakan hal terpenting dan menjadi kunci dalam keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang. Tanpa adanya keterlibatan aktor, implementasi peraturan daerah ini tidak akan berjalan dengan semestinya. Berdasarkan penelitian di lapangan ditemukan fakta bahwa masih terdapat aktor dalam kebijakan ini yang belum memiliki pengetahuan tentang Peraturan Daerah Kota Semarang No. 4 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV/AIDS ini. Aktor yang dimaksudkan tersebut adalah Dinas Sosial, ODHA, dan masyarakat, sedangkan aktor lainnya seperti Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS, Tenaga Kesehatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang cukup terkait isi dari perda ini. Meskipun pada umumnya semua aktor yang terlibat mendukung penuh terkait kegiatan-kegiatan pencegahan HIV/AIDS di Kota Semarang, namun tingkat pengetahuan yang rendah dari ketiga aktor tersebut menyebabkan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh aktor ini dalam peraturan daerah tidak terlaksana dengan optimal. Hal ini tentu memberikan dampak bagi tingkat kepatuhan dan daya tanggap yang dimiliki oleh aktor-aktor tersebut dalam implementasi kebijakan ini. Dinas Sosial dan ODHA yang notabene memiliki tingkat pengetahuan yang rendah terhadap perda ini juga memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dibandingkan dengan kelima aktor lainnya.

#### **5.1.1.2 Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor**

Setelah mengetahui karakteristik dari aktor yang terlibat serta dampaknya pada tingkat kepatuhan dan daya tanggap dari aktor tersebut dalam

mengimplementasikan kebijakan yang ada, peneliti kemudian memetakan peran aktor yang terlibat itu menggunakan *Power Interest Grid* milik Eden dan Ackermann. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan, didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Aktor yang tergolong *Key Player* adalah Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS. Aktor ini selain memiliki kekuasaan yang besar juga memiliki kepentingan yang tinggi dalam implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang, sehingga peran atau keterlibatan dari aktor ini perlu dijaga agar implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan dengan optimal.
- b. Aktor yang tergolong tipe *Subject* adalah Tenaga Kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan ODHA. Aktor ini meskipun memiliki kekuasaan yang kecil namun ketertarikan dan kepentingannya dalam implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang dapat terbilang tinggi. Menyikapi hal ini, aktor yang tergolong *Subject* perlu diberikan informasi secara komprehensif terkait pelaksanaan program-program penanggulangan HIV/AIDS agar nantinya aktor-aktor tersebut dapat menjadi mitra yang lebih baik dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS ini.
- c. Aktor yang tergolong tipe *Context Setter* adalah Dinas Sosial. Aktor tipe ini memiliki kekuasaan yang besar namun tidak memiliki kepentingan atau ketertarikan yang tinggi dalam proses implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS. Aktor ini perlu dianalisis lebih dalam terkait apa yang menjadi ketertarikan dan kepentingannya, sehingga kedepannya peran aktor ini dapat lebih dikembangkan.

d. Aktor yang tergolong tipe *Crowd* adalah Masyarakat. Aktor ini memiliki kekuasaan dan kepentingan yang rendah dalam implementasi kebijakan ini. Kendati demikian aktor implementasi tipe ini perlu dijaga dengan cara terus memberikan informasi dalam batas yang diperlukan.

#### **5.1.1.3 Kepatuhan dan Daya Tanggap**

Berdasarkan penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa sebagian besar aktor telah melaksanakan kewajibannya seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Semarang No. 4 tahun 2013. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan dari sebagian aktor yang tinggi terhadap peraturan daerah tersebut. Kendati demikian, masih ada beberapa aktor yang memiliki tingkat kepatuhan yang cukup rendah seperti Dinas Sosial yang hanya menjalankan 2 dari 5 kewajibannya sebagai pekerja sosial dan ODHA yang hanya menjalankan 1 dari 3 kewajibannya. Dinas Sosial belum optimal dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan daerah yang ada karena adanya perubahan nama dan struktur lembaga pada Dinas Sosial sehingga menyebabkan adanya beberapa kendala pada pelaksanaan program-program penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu minimnya tingkat pengetahuan dari pengurus yang baru terkait Peraturan Daerah Kota Semarang No. 4 tahun 2013 juga menyebabkan tingkat kepatuhan dari Dinas Sosial terhadap peraturan tersebut pun menjadi rendah. Hal ini serupa dengan yang terjadi pada ODHA, tingkat kepatuhan ODHA terhadap peraturan daerah yang ada dapat dikatakan rendah karena tingkat pengetahuan yang dimiliki ODHA terkait peraturan daerah ini juga terbilang rendah. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran dari ODHA untuk mematuhi segala peraturan yang ada dan setiap anjuran yang dokter berikan

membuat pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS oleh ODHA menjadi sulit terlaksana. Alhasil pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang menjadi tidak berjalan dengan optimal.

## **5.2 Saran**

- a. Perlu dilakukan koordinasi antara Dinas Sosial, KPA, Dinas Kesehatan dan beberapa lembaga lainnya terkait apa yang menjadi tugas dan kepentingan masing-masing lembaga tersebut sehingga nantinya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengoptimalkan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang. Selain itu perlu adanya perbaikan komunikasi di masing-masing lembaga, khususnya di Dinas Sosial sehingga apabila kedepannya terjadi mutasi jabatan atau pergantian kepemimpinan, pimpinan yang baru dapat berkonsultasi dengan pimpinan yang lama sehingga program kerja yang sudah berlangsung dapat terus dilaksanakan.
- b. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, diharapkan mampu memberikan informasi atau edukasi dini kepada masyarakat terkait pencegahan HIV/AIDS dan bagaimana penularan sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan-tindakan preventif tanpa melakukan diskriminasi kepada ODHA atau pengidap HIV/AIDS.
- c. Pemerintah harus berkomitmen untuk memberikan penghargaan atau apresiasi kepada lembaga-lembaga baik internal maupun eksternal pemerintah yang turut aktif terlibat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang sehingga diharapkan ke depannya keterlibatan semua sektor

dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang.

- d. Bagi Tenaga Kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ODHA dan memberikan pemahaman kepada ODHA tentang pentingnya mengkonsumsi obat secara rutin dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan anjuran dokter secara berkala, serta diharapkan dapat menggandeng LSM dan kelompok dukungan sebaya untuk memberikan peneguhan bagi ODHA sehingga ODHA menjadi tidak terpuruk dan angka *Lost to Follow Up* menjadi semakin berkurang.
- e. Bagi ODHA, diharapkan dapat lebih kooperatif dengan memberikan data/identitas diri dengan benar dan jelas kepada petugas kesehatan, serta mematuhi setiap anjuran dokter dengan meminum obat secara rutin dan melakukan pemeriksaan secara berkala serta tidak menyebarkan virus HIV kepada pasangan atau masyarakat lainnya.
- f. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat merangkul ODHA sehingga mereka tidak merasa tertekan dan tetap menjalankan pengobatannya sebagaimana mestinya. Selain itu masyarakat juga perlu lebih waspada terhadap penyebaran HIV, dengan tidak melakukan seks bebas, menggunakan jarum suntik secara bergantian, dan mengedukasi kerabat terdekatnya untuk menjaga pola hidup sehat.